



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 439 /KEP/DISKOMINFO/VI /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2021.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan walikota Pangkalpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Daerah Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 18);

18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi & Pengaduan Online Rakyat Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2021, dengan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pembina

- a. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kota Pangkalpinang yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
- b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kota Pangkalpinang.

2. Penanggung Jawab/Ketua

- a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian pengaduan di Organisasi Perangkat Daerah, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
- c. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021
- KELIMA : Keputusan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal _____ 2021


H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 439 / KEP / DISKOMINFO / 2021
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021

- I. Pembina : 1. Wali Kota Pangkalpinang
2. Wakil Wali Kota Pangkalpinang
- II. Penanggung Jawab/Ketua : 1. Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Inspektur Kota Pangkalpinang
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

IV. Pengelola Pengaduan /Tim Administrator

No.	SKPD	Nama Admin	Jabatan	No HP	e-mail
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diah Mayasari, SH	Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik	0813 6770 9993	Diahmayasari1580@gmail.com

V. Pejabat Penghubung

No	OPD	Nama Penghubung	No. HP	e-mail
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ima Niar Rosanti, A.Md	0822 7985 9090	diskominfo@pangkalpinangkota.go.id
2	Sekretariat DPRD	Sri Handayani	0811 7178 422	setwan@pangkalpinangkota.go.id
3	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Ratih Selfina, A.Md	0813 6604 4205	dpmtstpnaker@pangkalpinangkota.go. id
4	Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Bagian Organisasi	Surya Fatoni	0822 8222 4520	setdako@pangkalpinangkota.go.id
5	Kecamatan Girimaya	Kartini	0852 7929 5923	kec-girimaya@pangkalpinangkota.go.id
6	Kecamatan Rangkui	Siti Rofaidah	0812 1031 0376	kec-rangkui@pangkalpinangkota.go.id
7	Inspektorat	Riski Offana, S.Kom	0852 6884 7879	inspektoratdaerah@pangkalpinangkot a.go.id
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ulfa Sari Febriani, S.Kom	0852 6706 0716	dikbud@pangkalpinangkota.go.id
9	Dinas Sosial	Arsyaf Suryadin, A.Md	0856 0934 6499	dinsos@pangkalpinangkota.go.id

	OPD	Nama Penghubung	No. HP	e-mail
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Suryo Hadi JK., ST	0821 8630 0606	pupr@pangkalpinangkota.go.id
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Alde Fatmian Hafiz	0821 8239 9804	disperkim@pangkalpinangkota.go.id
12	Dinas Pangan dan Pertanian	Preim Kemal Adyita	0813 6868 7868	dispaper@pangkalpinangkota.go.id
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fendra Iskandar, S.Kom	0852 6738 0805	disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id
14	Dinas Lingkungan Hidup	Sriwiyanti, SE	0812 7126 9581	dlh@pangkalpinangkota.go.id
15	Dinas Pariwisata	Riharnadi, SE	0852 6740 1481	dispar@pangkalpinangkota.go.id
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ahmad Ramadhan, S.AP	0853 8088 8914	dispersip@pangkalpinangkota.go.id
17	Badan Keuangan Daerah	Suargo	0813 6779 8615	bakeuda@pangkalpinangkota.go.id
18	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Firmansyah, SE	0821 7651 0155	bappelitbangda@pangkalpinangkota.go.id

	OPD	Nama Penghubung	No. HP	e-mail
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Eni Dewanti, A.Md	0859 7730 0800	bkpsdmd@pangkalpinangkota.go.id
20	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	Reza Al Paringgi, A. Md	0852 6884 9955	bpbdb@pangkalpinangkota.go.id
21	Kecamatan Gabek	Dennie Antrika, S.Sos	0813 6845 5761	kec-gabek@pangkalpinangkota.go.id
22	Satuan Polisi Pamong Praja	Renny Husnita, SE	0852 6718 9889	satpolpp@pangkalpinangkota.go.id
23	Kecamatan Gerunggang	Rendra Jaya Asaktiko	08237433 3334	kec-gerunggang@pangkalpinangkota.go.id
24	Dinas Perhubungan	Neli Dahlianti, SE	0821 6868 8839	dishubb@pangkalpinangkota.go.id
25	Kecamatan Taman Sari	Rigustin Leonardy	0823 8099 3441	kec-tamansari@pangkalpinangkota.go.id
26	RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang	Erma Apriyanti, A.Md	0812 7942 8553	rsuddepatihamzah1708@gmail.com
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nurholis. S	0821 7715 2370	kesbangpol@pangkalpinangkota.go.id

No	OPD	Nama Penghubung	No. HP	e-mail
28	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	Romlan	0819 2914 7192	diskopdagumkm@pangkalpinangkota.go.id
29	Kecamatan Pangkalbalam	Fitri Mayani P	0813 8238 8606	pangkalbalam@pangkalpinangkota.go.id
30	Kecamatan Bukit Intan	Joko Susilo	0852 6710 1583	kec-bukitintan@pangkalpinangkota.go.id
31	Dinas Kesehatan	Oktarina, A.Md	0877 4867 4161	dinkes@pangkalpinangkota.go.id
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Timi Putri	0819 9564 1021	dpppakh@pangkalpinangkota.go.id
33	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sri Widayati	0812 7126 9581	dkp@pangkalpinangkota.go.id
34	Dinas Pemuda dan Olahraga	Yanka Bimantara	0853 7878 7428	dispora@pangkalpinangkota.go.id



 WAKIL KOTA PANGKALPINANG,
 H. MAULAN AKLIL